



Dindikpora Perpanjang Pengajuan Akun SPMB SMP

JCW Khawatirkan untuk Akomodasi Anak Pejabat

JOGJA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja memperpanjang batas waktu pengajuan akun dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP tahun 2025. Keputusan ini menimbulkan tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk sorotan dari lembaga pemantau kebijakan publik.

Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Dindikpora Kota Jogja Mannarima



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

DIPERPANJANG: Orang tua calon murid baru mengurus tahapan verifikasi SPMB jalur domisili radius di SMPN 6 Jogja (20/6).

menyampaikan, Dindikpora memperpanjang masa pengajuan akun SPMB SMP yang semula dijadwalkan berakhir 30 Juni 2025 menjadi hingga 2 Juli 2025 pukul 10.00 ■

Baca Dindikpora... Hal 7



FAHMI FAHRIZA/RADAR JOGJA



Kalau pengajuannya tidak diperpanjang dan ada kesalahan pengajuan data, malah nanti repot ke sana-sini mengurus verifikasi."

MANNARIMA

Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Dindikpora Kota Jogja

Dindikpora Perpanjang Pengajuan Akun SPMB SMP

Sambungan dari hal 1

Untuk diketahui, kebijakan ini berlaku untuk jalur domisili wilayah, jalur Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), dan jalur prestasi umum. Verifikasi berkas dijadwalkan tetap berlangsung hingga 2 Juli pukul 14.00.

"Langkah ini diambil berdasarkan permintaan masyarakat dan hasil evaluasi regulasi," katanya kepada *Radar Jogja* kemarin (1/7).

Perpanjangan ini berlaku

untuk seluruh proses SPMB tingkat SMP di wilayah Kota Jogja yang menggunakan sistem *real time online* (RTO).

Menurut Mannarima, perpanjangan diberikan untuk mengakomodasi para peserta yang belum sempat mengajukan akun. Termasuk yang mengalami kendala teknis atau keliru memahami alur pendaftaran.

"Kalau pengajuannya tidak diperpanjang dan ada kesalahan pengajuan data, malah nanti repot ke sana-sini mengurus verifikasi," ujarnya

Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) melalui Deputy Bidang Pengaduan Masyarakat Baharuddin Kam-ba turut menanggapi secara kritis keputusan itu. Secara prinsip ia mengungkapkan, surat keputusan perpanjangan itu tidak transparan karena tidak mencantumkan alasan resmi perpanjangan, tanggal awal, dan jalur yang dimaksud.

"Kalau tujuannya membantu masyarakat yang belum paham sistem, tentu patut diapresiasi. Tapi masyarakat

tetap perlu mengawal jangan sampai ini dimanfaatkan oknum tertentu, apalagi anak pejabat," tegasnya.

Ia juga menilai waktu pengajuan sebelumnya, yakni 18 hingga 30 Juni 2025, sebenarnya sudah cukup panjang. Apalagi dengan sosialisasi yang gencar dari Disdikpora, termasuk melibatkan orang tua siswa kelas 6 SD.

"Publik tetap harus mengawasi proses pendaftaran agar tidak ada manipulasi yang merugikan masyarakat," sebutnya. **(iza/laz/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005